

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.* <http://kemenkeu.go.id> (diakses Februari 22, 2019).
- Analisis Kinerja Pendapatan pada Dinas Pengelolah Keuangan Asset dan Pendapatan Minahasa Selatan *Jurnal Emba* 2016
- DJPK Kementerian Keuangan. *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012.* Jakarta, 2013.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- . *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- . *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga.* UPP AMP YKPN, 2011.
- KBBI. *KBBI Daring.* 1 10 2020.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi%20daerah> (diakses 12 5, 2020).
- Kemenkeu. *Peraturan Kementerian Keuangan 166/PMK.06/2015 Tentang Penilaian BMN.* <http://www.kemenkei.go.id> (diakses Februari 10, 2019).
- KPPOD. “Birokrasi Terus Menguras APBD.” 2018.
- Lontaan, Indra Christian, dan Sonny Pangerapan. “ANALISIS BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2012-2014.” *Jurnal Emba*, 2016.
- Lukitosari, D. “Analisis Komposisi Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Magelang Tahun 2010-2012.” *Thesis tidak dipublikasikan. FEB. UGM, Yogyakarta*, 2015.



Mahsun, Mohammad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2009.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV ANDI Offset, 2009.

—. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.

Margono. *DTSD Kekayaan negara Tahun 2016*. 2016.

Musianto, Lukas S. “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian.” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 4, No. 2, 2004.

Muthoharoh, F. “Analisis Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2012-2016.” *Skripsi tidak dipublikasikan. FEB. UGM, Yogyakarta*, 2019.

*Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. 2005.

*Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, 2006.

Prawoto, Nano, dan Agus Tri Basuki. “MODEL ANALISIS KOMPOSISI PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG GOOD GOVERNANCE : STUDI EMPIRIS KABUPATEN KOTA DI INDONESIA TAHUN 2011-2014.” *Buletin Ekonomi*, 2016.

*PSAP No. 1*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Republik Indonesia. *Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.



Republik Indonesia. *UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah.*

RI. *UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.* 2014.

RI. *UU No.17 tahun 2003.* 2003.

Rismanidar. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2015.” *Tugas Akhir Tidak Dipublikasikan. Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, 2017.*

Ritonga, Irwan Taufiq. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia.* Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009.

Ritonga, Irwan Taufiq, Ehrmann Suhartono, dan Danik Purbaya. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Pengantar. Cetakan 1.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Safari, Cepi Triana. “Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.” *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 2019.

Sumarjo, Hendro. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, 2010.

Swabra, Diana Polince. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012-2016 .” *Thesis tidak dipublikasikan. Ekonomika Pembangunan. UGM, Yogyakarta, 2018.*

Tenda, Mirki Vici S., Harijanto Sabijono, dan Victoriana Z. Tirayoh. “Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota manado T.A 2010-2012.” *Jurnal Emba*, 2014.

UU No. 33 Tahun 2004, Bab II, Pasal 2;. *UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.* Jakarta, 5 12 2020.